



LAPORAN KINERJA

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
JEMBER**

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.

Jember, Januari 2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Penyelia Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal : |
|--|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | |
| C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI..... | |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 5 |
| A. RENCANA STRATEGIS | |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN | |
| C. PERJANJIAN KINERJA | |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. | 12 |
| A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021 | |
| B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN | |
| | |
| BAB IV. PENUTUP. | 31 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021 | |
| Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 | |
| Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 | |
| Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD | |
| Lampiran 5 Rencana Aksi | |
| Lampiran 6. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada) | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yaitu "mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman".

Capaian Kinerja sasaran tahun 2019 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (Dua) indikator sasaran, dengan capaian 29 (Dua puluh sembilan) indikator tergolong Sangat Baik, dan 2 (dua) indikator tergolong kurang

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah

dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 80% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, dalam kategori **Kurang** dan 20 % indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.8.936.060.916 terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.4.024.206.032,00, Belanja Barang dan Jasa Rp.1.707.927.384,00 Belanja hibah sebesar Rp.3.062.392.500 dan Belanja Modal Rp.141.535.000,00.

Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.504.633.109 (83,98%) dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Kegiatan di laksanakan sudah sesuai dengan anggaran, namun untuk mencapai target sasaran ms blm maksimal.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kegiatan tersebut untuk dapatnya mendapatkan anggaran yg sesuai pada tahun anggaran 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka meningkatkan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 6 tahun 2012 sebagai berikut :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu koordinasi Hubungan Antar Lembaga, hubungan partai politik, hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mediasi Integrasi Bangsa, fasilitas Kajian Strategis dan Politis serta Hak Azasi Manusia (HAM), menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan kebijaksanaan Bupati.

- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Menyusun rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga, integrasi Bangsa dalam rangka memelihara stabilitas Bangsa di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Melaksanakan mediasi dan sinkronisasi dalam rangka fasilitas kegiatan Kajian Strategis dan Politis.
 - c. Melaksanakan pemantauan, pemasyarakatan, evaluasi, perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
 - d. Merumuskan perencanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - e. Merumuskan dan merencanakan kebijakan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
 - f. Memfasilitasi Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif, hubungan Partai Politik, Yayasan, Ormas dan LSM dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Wilayah dan Politik.
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif, Presiden Wakil Presiden dan pemilihan Bupati.
 - h. Memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan sistem Pendidikan Politik, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang Politik.
 - i. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan rencana penetapan nilai-nilai kepahlawanan serta mengkoordinasikan penetapan tanda penghormatan dan jasa .
 - j. Mengeluarkan dan mengkaji rekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (riset, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan sejenisnya), hiburan/keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.
 - k. Merumuskan kebijakan strategis dan politis dibidang Ideologi Politik Sosial dan Budaya di Wilayah/Daerah.
 - l. Meningkatkan Ketahanan Nasional masyarakat dengan upaya kesadaran bela negara.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

* Sub Bagian Perencanaan

* Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik

* Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan

* Sub Bidang Lembaga Wilayah Dan Politik

d. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Hak Asasi Manusia

* Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

* Sub Bidang Hak Asasi Manusia

e. Bidang Kajian Strategis dan Politis

* Sub Bidang Kajian Idiologi Dan Politik

* Sub Bidang Kajian Sosial, Ekonomi Dan Budaya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2021-2026 yaitu: *“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri”*

Yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan.
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Asin, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

2. Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke satu (1) Yaitu :

“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government) serta Profesionalitas Pelayanan Publik”**

Dengan sasaran : **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”**

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.
- **Sasaran 1** : Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
- **Tujuan 1** : Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.
- **Sasaran 1** : Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
- **Strategi 1** : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban
Kebijakan 1 : Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting kewaspadaan nasional kepada aparatur dan masyarakat untuk NKRI.
Program 1 : Pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal.
- **Strategi 2** : Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (Disintegrasi Bangsa) melalui gatra Idiologi, Politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban.
Kebijakan 2 : Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategis pemecah masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi Bangsa.
Program 2 : a. Sosialisasi dan edukasi produk hukum
b. Sosialisasi dan edukasi HAM pada pelajar
c. Pengadaan petugas mediator penanganan kasus HAM
d. Pembentukan Lembaga resolusi konflik hukum dan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 1 (satu) sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Sasaran 1 : Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman

Indikator Sasaran : 1. Prosentase konflik sosial didaerah (konflik) yang tertangani
2. Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 sebanyak 6 (enm) program utama yaitu :

a. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Indikator Program Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Indikator Program Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator Program kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan politik

- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Indikator Program terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Indikator Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial mantap.

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Program Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sesuai dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

- a. **Program** Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri kegiatan-kegiatan :

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Peningkatan Kader Bela Negara.

- b. **Program** Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. terdiri kegiatan-kegiatan :

Kegiatan : Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik

- c. **Program** Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Terselenggaranya Forum Silaturahmi ormas
- d. **Program** Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Kegiatan** : Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Indikator Program terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.
- Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Peningkatan Kapasitas Kerukunan Umat Beragama
- e. **Program** Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
- Kegiatan**: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial .
- Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)
- f. **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
1. **Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Indikator Program Terbayarnya honor pengelola keuangan
 2. **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Persentase penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor
 3. **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Tercukupinya administrasi umum di OPD
 4. **Kegiatan** : Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Tersedianya jasa penunjang **urusan pemerintahan**

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : terpeliharanya barang milik daerah.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban | Prosentase konflik sosial di Daerah (Konflik) yang tertangani | 100% |
| 2 | Memelihara Kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan Bangsa (Disintegراسi Bangsa) melalui gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Ketertiban | Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | 100% |

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi | Bidang Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Terciptanya situasi dan kondusi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman | Prosentase konflik sosial di Daerah (Konflik) yang tertangani | $\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yg tertangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$ | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | $\frac{\text{Realisasi tahun sekarang}}{\text{Realisasi th sebelumnya}} \times 100\%$ | | |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

| No | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Lebih dari 100 % | SANGAT BAIK |
| 2. | 76 % s/d 100 % | BAIK |
| 2. | 55 % s/d 75 % | CUKUP |
| 3. | Kurang dari 55 % | KURANG |

Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | CAPAIAN |
|-----|--|---|-------------|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban | Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan Bangsa (Disintegrasikan Bangsa) melalui gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Ketertiban | Prosentase pelanggaran hukum dan / atau HAM per tahun (kasus) yang tertangani | 100 | 100 | 100 |

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja dari 1 (satu) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

Tujuan 1. Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Sasaran 1. Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI | | | | |
|-----|---|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman | 1 Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI Th. 2021 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|---|---|----------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman | 1. Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani | 100% | 100% | |
| | | 2. Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | 100% | 100% | |

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th. 2021 | REALISASI | KET. |
|-----|---|---|--------------------|-----------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman | 1. Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani | | - | - |
| | | 2. Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | | - | - |

Sumber Data: data realisasi nasional tidak tersedia

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, sebagai berikut :

1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

| | | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------------|--------|
| Masukan/Input | : | pembentukan kader bela negara dalam rangka memperkuat ketahanan bangsa | 335.482.500 | 312.652.500 | 93,19% |
| Keluaran/Output | : | Mengukur jumlah sumberdaya, SDM. | 226 desa, 22 Kelurahan | 226 desa, 22 kelurahan | 100% |
| Penjelasan kegiatan | : | Pembentukan Kader Bela Negara dengan peserta perangkat desa/kelurahan se-kab. Jember | | | |







2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.

Sub. Kegiatan Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah

| | | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------|
| Masukan/Input | : | Terwujudnya kehidupan Demokrasi yang lebih berkualitas | 3.113.442.500 | 3.107.595.000 | 99,81 |
| Keluaran/Output | : | Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan pada Partai Politik | 11 Partai Politik | 11 Partai Politik | 100 |
| Penjelasan kegiatan | : | pelaksanaan verifikasi bantuan pada partai politik | | | |





3. **Program** Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Kegiatan** Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.
- Sub Kegiatan** Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

| | | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---------------|---|---|-------------|-------------|-------|
| Masukan/Input | : | Untuk mengetahui keberadaan Ormas terkait Legalitas dan | 141.812.000 | 141.282.055 | 99,63 |

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|----------|
| | | kegiatannya | | |
| Keluaran/Output | : | Terwujudnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Ormas | | 50 ormas |
| Penjelasan kegiatan | : | Silaturahmi Bupati Jember dengan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-Kab. Jember | | |





4. **Program** Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

| | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---------------------|---|-------------|-----------|-------|
| Masukan/Input | : Menciptakan harmonisasi sosial dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 109.599.700 | 84336300 | 76,95 |
| Keluaran/Output | : Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | 8 x Rakor | 8 x Rakor | |
| Penjelasan kegiatan | : Pertemuan Forum kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | | | |





5. **Program** Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial

1. **Sub Kegiatan** Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

| | | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---------------------|---|---|-------------|-------------|-------|
| Masukan/Input | : | Mengidentifikasi kegiatan yang akan diukur kinerjanya | 146.566.500 | 127.312.500 | 86,86 |
| Keluaran/Output | : | Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | | | |
| Penjelasan Kegiatan | : | Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan di masyarakat | | | |



2. **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteljen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

| | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-------|
| Masukan/Input | : Mengidentifikasi kegiatan yang akan diukur kinerjanya | 181.416.800 | 17444.0999666.272 | 95,96 |
| Keluaran/Output | : Tim Kewaspadaan Dini (WASDIN) | | | |
| Penjelasan Kegiatan | : Rakor Tim Wasdin | | | |



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI | | | | |
|-----|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | Terciptanya Situasi dan Kondisi masyarakat yang aman tertib dan nyaman | Presentase konflik sosial di daerah (Konflik) yang tertangani | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | | | | | |

Sumber Data: Bakesbang dan Politik

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI Th. 2021 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|---|--|----------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terciptanya Situasi dan Kondisi masyarakat yang aman tertib dan | Presentase konflik sosial di daerah (Konflik) yang tertangani | 100% | 100% | - |
| | | Presentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | 100% | 100% | - |

Sumber Data: Bakesbang dan Politik

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th. 2021 | REALISASI NASIONAL | KET. |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terciptanya Situasi dan Kondisi masyarakat yang aman tertib dan | Presentase konflik sosial di daerah (Konflik) yang tertangani | | - | - |
| | | Presentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | | - | - |

data realisasi nasional nihil

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.936.060.916,- yang terdiri dari:

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| a. | Belanja Operasi | | Rp. 8.794.525.916,- |
| | Belanja Pegawai | Rp. 4.024.206.032,- | |
| | Belanja Barang/jasa | Rp. 1.707.927.384,- | |
| | Belanja Hibah | Rp. 3.062.392.500,- | |
| b. | Belanja Modal | | Rp. 141.535.000,- |
| | - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 141.535.500,- | |

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 98,4% dan Belanja Modal sebesar 0,01%

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 terdiri dari:

| No | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----|--|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 335.482.500 | 312.652.500 | 93,19 |
| | Keg : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 335.482.500 | 312.652.500 | 93,19 |
| | Sub Keg : Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 335.482.500 | 312.652.500 | 93,19 |
| 2 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 3.113.442.500 | 3.107.595.000 | 99,81 |
| | Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan | 3.113.442.500 | 3.107.595.000 | 99,81 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------|
| | Pemerintahan, | | | |
| | Sub Keg. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemnataan situasi politik di daerah | 3.113.442.500 | 3.107.595.000 | 99,81 |
| 3 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 141.812.000 | 141.282.055 | 99,63 |
| | Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 141.812.000 | 141.282.055 | 99,63 |
| | Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 141.812.000 | 141.282.055 | 99,63 |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 109.599.700 | 84.336.300 | 79,95 |
| | Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 109.599.700 | 84.336.300 | 79,95 |
| | Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 109.599.700 | 84.336.300 | 79,95 |
| 5 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik sosial | 327.983.300 | 301.408.772 | 91,89 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial | 327.983.300 | 301.408.772 | 91,89 |
| | Sub Keg. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi | 146.566.500 | 127.312.500 | 86,86 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------|
| | kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah | | | |
| | Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah | 181.416.800 | 174.096.272 | 95,96 |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | |
| | Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 269.222.000 | 187.526.500 | 69,65 |
| | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 269.222.000 | 187.526.500 | 69,65 |
| | Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 3.847.356.032 | 2.766.899.054 | 71,92 |
| | Sub Keg. Gaji dan Tunjangan ASN | 3.847.356.032 | 2.766.899.054 | 71,92 |
| | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 151.537.848 | 150.157.280 | 99,09 |
| | Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 151.537.848 | 150.157.280 | 99,09 |
| | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 144.396.800 | 139.817.502 | 96,82 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor | 3.202.500 | 3.197.500 | 99,84 |
| | Penyediaan bahan logistik Kantor | 65.406.000 | 60.960.581 | 93,20 |
| | Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | 17.900.300 | 17.900.141 | 100 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000 | 2.950.000 | 98,33 |
| | Fasilitasi kunjungan tamu | 5.280.000 | 5.234.820 | 99,14 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.608.000 | 49.574.460 | 99,93 |
| | Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 141.535.000 | 0 | 0 |
| | Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | 141.535.000 | 0 | 0 |
| | Keg. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 216.087.736 | 178.503.197 | 82,60 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Sub. Keg. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 88.710.000 | 52.648.677 | 59,35 |
| Sub. Keg. Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor | 32.373.600 | 31.924.074 | 98,61 |
| Sub. Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor | 95.004.136 | 93.930.473 | 98,87 |
| Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 137.605.500 | 134.454.949 | 97,71 |
| Sub. Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | 26.373.500 | 25.691.250 | 97,41 |
| Sub. Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan | 91.342.000 | 88.873.699 | 97,30 |
| Sub. Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 19.890.000 | 19.890.000 | 100 |
| TOTAL | 8.936.060.916 | 7.504.633.109 | 83,98 |

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Starategis I: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan an ketertiban

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Dengan Anggaran Rp 327.983.300,00
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaandengan Anggaran Rp 335.482.500,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 663.465.800,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 0,07% dari keseluruhan belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (tiga) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indikator.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.504.633.109 (83,98%) dan Belanja langsung sebesar Rp 7.504.633.109 (83,98%),

Demikian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran | | |
|----|--|--|--|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|---|--|--|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Strategi | Kebijakan | Program |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman | Presentase konflik sosial di daerah (Konflik) yang tertangani | Terciptanya Situasi dan Kondisi masyarakat yang aman tertib dan nyaman | Presentase konflik sosial di daerah (Konflik) yang tertangani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban | Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting kewaspadaan nasional kepada aparaturnya dan masyarakat untuk NKRI | Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal |
| | | Presentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | | Presentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui | Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat kemampuan memahami | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Sosialisasi produk hukum ✓ Program sosialisasi dan edukasi HAM pada pelajar ✓ Program pengadaa |

LAMPIRAN 1

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi, gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban | n terhadap masalah dan strategis pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa | n petugas mediator penanganan kasus HAM ✓ Program pembantuan lembaga resolusi konflik hukum dan penghormatan HAM |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letjen. S.Parman No. 89☎ (0331) 337853Jember

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/1.a/1.31/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** Kabupaten Jember sebagai manadi maksud dalam Diktum **KESATU** tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagai mana di maksud dalam Diktum **KESATU** dan **KEDUA** bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal Januari 2020

**KERALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



Des. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda

NIP 19620131 198201 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

| | |
|------------------|---|
| Instansi | : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Tugas | : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Fungsi | : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati |
| Tujuan | : Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman |
| Indikator Tujuan | : a. Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani b. Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman | 1. Persentase Konflik Sosial di Daerah (konflik) yang ditangani | $\frac{\text{Jumlah Konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$ | Bakesbangpol Kab.Jember | Bakesbangpol Kab.Jember |
| | | 2. Persentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | $\frac{\text{Realisasi Tahun Sekarang}}{\text{Realisasi Tahun Sebelum}} \times 100\%$ | Bakesbangpol Kab.Jember | Bakesbangpol Kab.Jember |



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 □ 337853 Jember

RENCANA AKSI TAHUN 2021

| SASARAN | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | Ket |
|--|---|--------------|---|--|---|--------|------------|-----|
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
| Terciptanya Situsi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertip dan nyaman | Jumlah konflik sosial di Daerah | Tw 1:3x keg | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial | Jumlah Peserta yang mengikuti rapat koordinasi tim | or/keg | Tw 1: 56 | |
| | | Tw 2:3x keg | | | | | Tw 2: 56 | |
| | | Tw 3:3x keg | | | | | Tw 3: 56 | |
| | | Tw 4:3x keg | | | | | Tw 4: 56 | |
| | Peningkatan peranan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kantrantibmas | Tw 1:..... | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Peningkatan peranan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kantrantibmas | or/keg | Tw 1:..... | |
| | | Tw 2:..... | | | | | Tw 2:..... | |
| | | Tw 3:3x keg | | | | | Tw 3: 93 | |
| | | Tw 4:3x keg | | | | | Tw 4: 93 | |
| Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga | Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara | Tw 1:..... | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela Negara | or/keg | Tw 1:..... | |
| | | Tw 2:..... | | | | | Tw 2:..... | |
| | | Tw 3:..... | | | | | Tw 3:..... | |
| | | Tw 4: 1x keg | | | | | Tw 4: 250 | |
| Peningkatan Peran dan Efektitas Tim | Laporan Perolehan Suara Pileg dan Pilpres Versi Hitung | Tw 1:..... | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga | Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang | Laporan Perolehan Suara Pileg dan | or/keg | Tw 1:..... | |
| | | Tw 2:..... | | | | | Tw 2:..... | |
| | | Tw 3:1x keg | | | | | Tw 3: | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------|---|---|---|--------|--|--|
| koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu (DESK) | Cepat | | Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik | Pilpres Versi Hitung Cepat | | 890 | |
| | | Tw 4:..... | | | | | Tw 4:..... | |
| | | | | | Fasilitasi dan verifikasi pelaksanaan PAW anggota DPRD dan verifikasi bantuan dana partai politik | parpol | Tw 1:..... Tw 2: Tw 3: 11 parpol Tw 4:..... | |
| | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Terselenggara ya Forum Silaturahmi ormas | or/keg | Tw 1:..... Tw 2:..... Tw 3: Tw 4: 50 | |

Jember, Januari 2022

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001



LAPORAN KINERJA

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
JEMBER**

TAHUN 2021

TAHUN 2022